

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu

Submission date: 03-Feb-2021 12:30PM (UTC+0700) *by Nurhaeni Jaya*

Submission ID: 1500509226

File name: PLAGIASI_SKRIPSI_NURHAENI_JAYA_-_Nurhaeni_Jaya.docx.pdf (126.59K)

Word count: 1241

Character count: 7970

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



OLEH:
NURHAENI JAYA
2016210136

3
KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020

RINGKASAN

Beberapa persoalan yang dialami oleh pelaksana UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi. Saat ini jumlah pelaku usaha di Kota Batu terdapat \pm 1.500 usaha. Mulai dari pengusaha makanan, rujak, keramik, dan sebagainya. Sedangkan untuk bias masuk dalam pasar online ini para pelaku usaha harus memiliki izin dari BPOM atau minimal Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Sebab hal tersebut menjadi syarat utama agar produk bisa dipasarkan. Selain itu juga kemasan harus menarik, bersih dan bagus. Untuk mempermudah pengembangan UMKM yang ada di Kota Batu akan dilakukan secara maksimal. Maka Pemerintah Kota Batu akan menyediakan mesin yang tidak dimiliki para pelaku UMKM salah satunya mesin *packing* atau kemasan, dimana hal ini menjadi faktor kurang maksimalnya produk UMKM yang di pasarkan.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Diskumdag Kota Batu, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Diskumdag Kota Batu.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan masyarakat, Program UMKM

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompas.com (Maret 2019) melansir bahwa ¹ Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan Pengkategorian penduduk miskin di Indonesia berada di bawah standar dunia yaitu 2 dollar AS, sementara untuk Indonesia sendiri hanya 1 dollar AS. Badan Pusat Statistika (BPS) pada Maret 2019 mengungkapkan bahwa tolak ukur garis kemiskinan untuk penduduk Indonesia mencapai ¹ Rp 425.250 per kapita tiap bulannya. Adapun garis kemiskinan primer (makanan) mencapai Rp 313.232 (76 %) dan garis kemiskinan sekunder (tidak termasuk makanan) mencapai Rp 112.081 (26,34 %). Maka dapat dikatakan bahwa orang miskin yang berada di Indonesia mempunyai penghasilan ¹ sebesar Rp 14.175 atau setara dengan 1 dollar AS setiap harinya.

Menurut data peta penyebaran kemiskinan yang dikeluarkan BPS, terdapat ¹ 3 (tiga) Provinsi di pulau Jawa masuk dalam kategori penduduk miskin terbanyak dibandingkan provinsi lainnya, diantaranya yaitu Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak ¹ 4,11 juta jiwa, Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 3,4 juta jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan menuntut semua pihak, terutama pemerintah agar mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program yang direalisasikan. Merealisasikan setiap program yang sudah direncanakan, menjadi salah satu tahapan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan (Kompas.com, 11 Maret 2019).

Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan adalah usaha keras yang dilakukan agar mempersiapkan masyarakat sejalan dengan usaha memperkokoh kelembagaan masyarakat supaya mampu mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian dalam tatanan keadilan sosial daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat pun menjadi suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, dimana saat ini mengalami kesulitan sehingga bisa membebaskan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pada dasarnya, konsep pemberdayaan ialah usaha atau upaya memandirikan dan mensejahterakan masyarakat (Rosidin, 2019:70-74).

Semenjak awal era Orde Baru sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sudah banyak menerapkan semua jenis program agar mendorong perkembangan dan pertumbuhan ¹¹UMKM. Diakui bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diharapkan agar terus berperan dalam ¹³mengurangi angka pengangguran dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga Pemerintah dapat menjalankan strategi upaya memerangi kemiskinan di dalam negeri terutama di bagian daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang UMKM (2008), dan memiliki sebuah departemen khusus untuk menangani UKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Bahkan di dalam UU Penanaman Modal yang terakhir pun dicantumkan pasal-pasal khusus terkait kelompok UMKM dan diketahui juga untuk beberapa tahun belakangan ini, diadakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Tambunan, 2017: v).

Diungkapkan oleh Hardjanto (2014: 17) bahwa di masa globalisasi dengan hal ihwal rivalitas di berbagai aspek yang semakin kuat, pemerintah daerah dituntut agar memperbaiki pola orientasi global. Pemerintah diminta mengatur organisasi birokrasinya dan *Mindset Birokratik* ke *Mindset Entrepreneur*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu motivasi/dorongan dari *stakeholder* atau entitas-entitas terkait yang berhubungan langsung dengan sektor swasta untuk fokus membentuk UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) misalnya pelatihan, promosi dan pendampingan agar UMKM dapat terus maju dan berkembang (Alves, dkk, 2015: 4).

Sama halnya dengan negara lain khususnya negara sedang berkembang, perkembangan atau pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala itu terbilang berselisih ⁶ di satu daerah dengan daerah lain, antar pedesaan dan perkotaan, antar bidang, atau antar sesama perusahaan di bidang yang serupa. Walaupun begitu, terdapat beberapa permasalahan yang konvensional bagi seluruh pelaksana UMKM di berbagai negara, terkhusus di kalangan negara yang masih merekah. Permasalahan-permasalahan yang lumrah itu mencakup dependensi aset operasional dan permodalan, permasalahan serius penjualan, diseminasi penyediaan bahan pokok, dan *input* lainnya, dependensi kanal informasi terkait prospek bursa dan sebagainya, rendahnya kualitas SDM dan kemampuan kapabilitas berteknologi, upah pengiriman dan intensitas yang tinggi, akses komunikasi yang terbatas, tingginya upah karena tata cara administrasi dan birokrasi yang bertautan dalam pembuatan izin usaha, serta

ketidaksesuaian disebabkan peraturan dan kebijakan-kebijakan perniagaan yang tak menentu atau tujuan yang kurang jelas (Tambunan, 2017: 44-45).

Beberapa persoalan yang dialami pelakon UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi. Saat ini jumlah pelaku usaha di Kota Batu terdapat ± 1.500 usaha. Mulai dari pengusaha makanan, rujak, keramik, dan sebagainya. Sedangkan untuk bias masuk dalam pasar online ini para pelaku usaha harus memiliki izin dari BPOM atau minimal Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Sebab hal tersebut menjadi syarat utama agar produk bisa dipasarkan. Selain itu juga kemasan harus menarik, bersih dan bagus. Dengan adanya izin itu sudah tentu mendapatkan kepercayaan dari konsumen (Malangtimes.com, 17 Maret 2019). Disampaikan juga oleh Pemkot Batu melalui Malang Times.com pada tanggal 18 Mei 2018 supaya memperluas dan memperlancar **usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Batu** akan dilakukan secara maksimal. Maka Pemerintah Kota Batu akan menyediakan mesin yang tidak dimiliki para pelaku UMKM salah satunya mesin packing atau kemasan yang menjadi faktor kurang maksimalnya produk UMKM yang di pasarkan.

Berdasarkan dari pembahasan diatas, sehingga penulis terdorong hendak mengangkat suatu penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM **USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu**”**.

7 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu?
- 10 2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu?

9 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kota Batu;
- 12 2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

5 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti sendiri dalam bidang Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. **Bagi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah**

Sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Sedangkan bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, rujukan, referensi atau karya ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

nasional.kompas.com

Internet Source

6%

2

publikasi.unitri.ac.id

Internet Source

4%

3

rinjani.unitri.ac.id

Internet Source

3%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

2%

5

contoh-contohskripsi.blogspot.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1%

7

eprints.perbanas.ac.id

Internet Source

1%

8

Ferry Duwi Kurniawan, Luluk Fauziah.

1%

"PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN", JKMP
(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publication

9	123dok.com Internet Source	1%
10	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
11	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
12	core.ac.uk Internet Source	1%
13	repository.upi.edu Internet Source	1%
14	docplayer.info Internet Source	1%
15	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On